

# SOAL KELEBIHAN BELANJA RP193 MILIAR RSUD PROVINSI NTB, BPK: KALAU TERBUKTI KITA TELUSURI



KEPALA BPK PERWAKILAN NTB, SUPARWADI. FOTO: MUHAMMAD YAMIN

Mataram (NTBSatu) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, menurunkan tim mengaudit keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB tahun anggaran 2024.

“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, kita cover juga,” kata Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, Rabu, 19 Februari 2025.

Audit keuangan di RSUD Provinsi NTB, kata Suparwadi, termasuk melakukan pengecekan

## PROSES AUDIT KELEBIHAN BELANJA

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Ervan Anwar menyampaikan, proses audit terkait kelebihan belanja di RSUD Provinsi NTB mulai Senin, 17 Februari kemarin.

“Ini BPK mau audit, khusus RSUD NTB itu ada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPK,” katanya, Senin, 17 Februari 2025.

Ia menyampaikan, pemeriksaan tak hanya di RSUD Provinsi NTB. Tapi, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) untuk semua

terhadap adanya indikasi kelebihan belanja sebesar Rp193 miliar.

“Kita akan cek. Kita akan lihat apa betul terjadi kelebihan belanja atau tidak. Kalau memang terbukti terjadi kita akan telusuri. Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi,” jelasnya.

Adapun proses audit laporan keuangan ini sampai akhir Mei 2025. Sementara pemeriksaan pendahuluan, memerlukan waktu sekitar satu bulan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

“Khusus untuk RSUD pemeriksaannya oleh tim PDTT. OPD lain hanya pemeriksaan LKP. Jadi ada dua tim, ada LKPD dan ada Tim PDTT untuk di RSUP,” tegas Ervan.

Menanggapi terkait adanya pemeriksaan dari BPK, Direktur Utama RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mengaku bakal kooperatif.

“Silakan diaudit kita siap menunggu,” singkat dr. Jack, sapaan Direktur RSUD Provinsi NTB, siang tadi.

# SOAL KELEBIHAN BELANJA RP193 MILIAR RSUD PROVINSI NTB, BPK: KALAU TERBUKTI KITA TELUSURI



KEPALA BPK PERWAKILAN NTB, SUPARWADI. FOTO: MUHAMMAD YAMIN

## PROSES AUDIT KELEBIHAN BELANJA

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU menyoroti membengkaknya belanja lewat tahun pada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Khususnya pada [Rumah Sakit Umum Daerah \(RSUD\) Provinsi NTB](#).

IJU membeberkan, terdapat kelebihan belanja 2024 yang rencana akan ditutup dengan alokasi APBD 2025 sekitar Rp193 miliar.

“Utang ini ditengarai kelebihan belanja. Sebab, tidak ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024,” ungkapnya kepada media, Rabu, 12 Februari 2025.

Terhadap temuan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini meminta, agar Inspektorat maupun terlibat BPKP untuk melakukan pemeriksaan khusus.

“Jangan hanya audit untuk melegalkan sebagai utang, agar bisa dibayar dalam APBD. Ini seperti hal yang berulang,” tegas IJU.

IJU mengkhawatirkan, pembengkakan ini merupakan praktik fraud pengelolaan. Sebab, sebagian besar dari utang ini merupakan belanja obat-obatan dan barang medis habis pakai.

“Jenis barang ini kan kayak jin, karena sifatnya habis pakai. Mengauditnya saja sudah susah karena barangnya sudah tidak ada,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut IJU, belanja seperti ini bisa terencana agar terkendali, sehingga tidak terus menerus menjadi utang. Pasalnya, pada tahun sebelumnya juga terjadi hal demikian.

Bahkan, jumlahnya terus membengkak dari hanya Rp38 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp193 miliar pada tahun 2024.

“Jangan-jangan ini seperti praktik PDAM yang setiap kelebihan neracanya ditutup dengan alasan pipa bocor tak terdeteksi,” bebernya. (\*)